

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MANIPULASI AKRUAL : STUDI PADA KABUPATEN/KOTA SUMATERA SELATAN

Sakalindu Kirana M.U.¹⁾, Rita Martini²⁾, Yuli Antina Aryani³⁾

^{1,2,3)} Politeknik Negeri Sriwijaya

Jl. Sriwijaya Negara Bukit Besar, Palembang

e-mail: kiranamagyanda07@gmail.com¹⁾, martinirita65@gmail.com²⁾, yuli_aa@polsri.ac.id³⁾

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh fiscal distress, kapasitas fiskal, ukuran pemerintah, dan perhitungan kelebihan anggaran terhadap manipulasi akrual kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari situs resmi PPID BPK RI. Populasi dalam penelitian ini adalah 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, dengan jumlah sampel sebanyak 85 sampel. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sampel jenuh. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan perangkat lunak statistik SmartPLS-SEM versi 4.1.0.2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial fiscal distress, ukuran pemerintah, dan perhitungan kelebihan anggaran berpengaruh signifikan terhadap manipulasi akrual. Sementara itu, variabel kapasitas fiskal tidak berpengaruh terhadap manipulasi akrual. Uji penelitian secara simultan menunjukkan hasil bahwa fiscal distress, kapasitas fiskal, ukuran pemerintah, dan perhitungan kelebihan anggaran secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap manipulasi akrual kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Kata kunci : Fiscal Distress, Fiscal Capacity, Government Size, SiLPA, dan Manipulasi Akrual

ABSTRACT

This research aims to determine the influence of fiscal distress, fiscal capacity, government size, and excess budget calculations on the manipulation of district/city accruals in South Sumatra Province. This research is quantitative research using secondary data obtained from the official PPID BPK RI website. The population in this study was 17 regencies/cities in South Sumatra Province, with a total sample of 85 samples. The sample selection in this study used the saturated sample method. Hypothesis testing in this study used multiple regression analysis with the help of SmartPLS-SEM version 4.1.0.2 statistical software. The results of this research show that partially fiscal distress, government size, and excess budget calculations have a significant effect on accrual manipulation. Meanwhile, the fiscal capacity variable has no effect on accrual manipulation. Simultaneous research tests show the results that fiscal distress, fiscal capacity, government size, and excess budget calculations together have a significant effect on the manipulation of district/city accruals in South Sumatra Province.

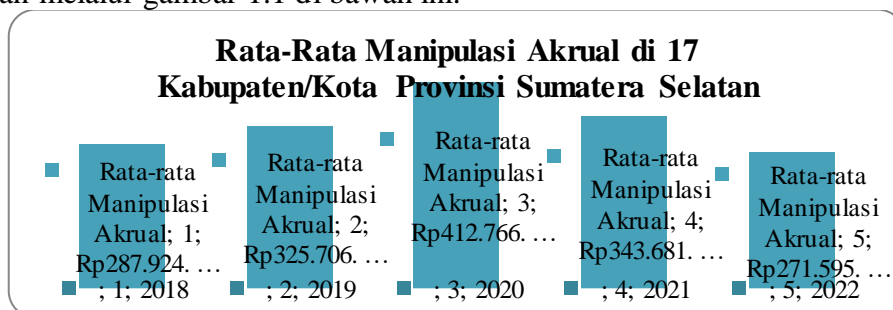
Keyword : Fiscal Distress, Fiscal Capacity, Government Size, Excess of Budget Calculations, and Accrual Manipulation.

1. Pendahuluan

Sejak tahun 2001 silam, Indonesia telah menerapkan konsep *New Public Management* (NPM). Dengan diberlakukannya konsep *New Public Management* ini, maka diharapkan setiap organisasi pemerintahan di Indonesia dapat meningkatkan kinerja serta akuntabilitasnya (Handayani, dkk., 2022). Dengan diberlakukannya konsep NPM ini, maka mendorong diberlakukannya pula sistem akuntansi berbasis akrual (Handayani, dkk., 2022). Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di Indonesia telah diberlakukan semenjak tahun 2015 silam. Tujuan dari adanya sistem akuntansi berbasis akrual ini untuk memberikan informasi terkait kondisi keuangan, serta kinerja keuangan. Penerapan sistem akuntansi

berbasis akrual ini tentu dipayung hukumi oleh Permendagri No. 64 Tahun 2013, dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Adanya penerapan akuntansi berbasis akrual diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas para pemangku kepentingan di organisasi pemerintahan (Kuroki, *et al.*, 2021). Kebijakan dan sistem akuntansi berbasis akrual diatur oleh peraturan kepala daerah, dan dapat meningkatkan fleksibilitas dalam proses penentuan angka-angka yang akan tersaji di dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), terutama pada Neraca dan Laporan Operasional (LO).

Manipulasi akrual ini apabila dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk hal-hal yang tidak baik maka akan menimbulkan masalah dikemudian hari, dan memberikan efek bias terhadap informasi yang tersaji pada laporan keuangan (Tampubolon, dkk., 2023; Cohen, *et al.*, 2019), sehingga dapat menimbulkan kekeliruan dalam proses pengambilan keputusan akibat dari adanya manipulasi informasi pada laporan keuangan tersebut. Pengambilan keputusan yang salah dan tidak bijaksana tentunya sangatlah dihindari bagi setiap pemerintah daerah karena dapat menimbulkan temuan pada proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mana akan mempengaruhi pemberian opini terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Penelitian terkait manipulasi akrual biasanya dilakukan pada sektor privat, akan tetapi fenomena manipulasi akrual telah merambah pada sektor publik. Beberapa kota madya di Amerika Serikat, Yunani, Italia, dan Portugal cenderung melakukan manipulasi akrual pada pelaporan keuangan pemerintah daerahnya untuk menghindari adanya surplus anggaran (Beck, 2018; Cohen, *et al.*, 2019; Ferreira, *et al.*, 2020). Pemerintah daerah berupaya untuk melaporkan hasil pendapatan positif mendekati nol untuk mem-framing bahwa anggaran telah terserap secara efektif dan efisien. Fenomena manipulasi akrual juga terjadi di 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, yang disajikan melalui gambar 1.1 di bawah ini.



Sumber : Data diolah, 2024

Gambar 1.1 Rata-Rata Manipulasi Akrual di 17 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2022

Fenomena manipulasi akrual yang terjadi di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan ini menjadi hal yang penting untuk diteliti karena apabila mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah, pemerintah melakukan kebijakan diskresi akrual untuk memanipulasi laporan keuangan agar surplus/defisit mendekati nol sehingga kinerja keuangan dan pengelolaan anggaran oleh pejabat pemerintahan terlihat baik dan efisien (Octariyani, dkk., 2022). Urgensi dari dilakukannya penelitian ini ialah manipulasi akrual yang telah merambat ke sektor publik terkhususnya sektor pemerintahan merupakan suatu hal yang harus diperhatikan secara khusus dan dilakukan upaya untuk meminimalisasinya. Dikarenakan setiap rupiah yang digunakan untuk kegiatan belanja pemerintah daerah dan pengalokasiannya pada pos-pos lain

tentu haruslah diawasi dan dilakukan sebaik mungkin agar menghasilkan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Akan tetapi, faktanya masih begitu tingginya praktik manipulasi akrual yang disalahgunakan oleh beberapa oknum nakal pada pelaporan keuangan pemerintah daerah yang membuat semakin jauhnya citra pelaporan keuangan pemerintah daerah dari kata efektif dan efisien, dan *worst scenario*-nya dapat merugikan negara dan rakyat.

2. Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

Teori Keagenan

Teori yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling pada tahun 1976 ini memiliki konsep bahwa terdapat satu atau lebih seorang *principal* yang dapat memerintah orang lain yang disebut *agent* untuk melakukan suatu jasa atas nama *principal*, serta diberikan wewenang untuk membuat kebijakan sebaik mungkin yang dapat menguntungkan *principal*. Teori keagenan sendiri dapat dideskripsikan sebagai hubungan antara prinsipal dan agen dimana pihak prinsipal memberikan wewenangnya kepada pihak agen untuk membuat suatu kebijakan, dan mengambil keputusan serta melakukan beberapa pelayanan untuk prinsipal. Pada kondisi yang sedemikian rupa, gesekan konflik kepentingan antara pihak prinsipal dan pihak agen sangat mungkin terjadi, mengingat dimana setiap individu akan selalu mementingkan kepentingannya masing-masing sehingga pihak agen dapat melakukan hal-hal diluar wewenang dan keinginan prinsipal (Ramadona, 2016; Olivian, 2021). Teori keagenan pada penelitian ini menjelaskan hubungan antara pihak pemerintah daerah yang berperan sebagai *agent* dan pihak pemerintah pusat yang berperan sebagai *principal* dalam upaya optimalisasi pengelolaan anggaran dan memberikan kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif dikemukakan oleh Watts dan Zimmerman pada tahun 1986, yang dibuat dengan tujuan untuk menjelaskan sedemikian rupa dalam memprediksi praktik akuntansi. Dengan adanya teori akuntansi positif, maka pembuat kebijakan dapat menjabarkan praktik akuntansi berdasarkan pengalaman yang dapat diuji secara empiris. Adapun hubungan antara teori akuntansi positif dengan manipulasi akrual yang terjadi pada pemerintah daerah yaitu semua informasi yang terdapat pada laporan keuangan menjadi faktor dalam keberhasilan pengambilan keputusan oleh pihak eksekutif yang menjadi dasar-dasar praktik akuntansi di lingkungan pemerintah daerah tersebut. Keberhasilan pihak eksekutif dalam mengambil keputusan sangat amat bergantung pada keakuratan informasi atau kebenaran data yang tersaji (Suripto & Supriyanto, 2021). Apabila praktik manipulasi akrual yang terjadi pada pemerintah daerah begitu tinggi, maka hal tersebut dapat mempengaruhi keabsahan informasi yang tersaji pada laporan keuangan tersebut dan berefek pada pengambilan kebijakan yang tidak sesuai serta praktik akuntansi yang tidak pro terhadap masyarakat luas.

Teori Stewardship

Teori *stewardship* mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dan kinerja organisasi tersebut, sehingga fungsi utilitas dapat bekerja dengan maksimal (Waliyani & Mahmud, 2015). Menurut teori *stewardship* (Donaldson, et al., 1991), pihak pemerintah

daerah selaku pengelola modal (*steward*) akan memenuhi keinginan dari pemilik modal (*principal*) yakni pemerintah pusat yang memberikan dana transfer untuk menopang pelayanan publik yang prima. Pihak *steward* harus memaksimalkan kinerjanya agar dapat memuaskan pihak *principal*.

Manipulasi Akruwal

Manipulasi akruwal merupakan suatu tindakan sengaja yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menyesuaikan akun akruwal sehingga dapat melakukan perubahan pada laporan keuangan untuk mencapai tujuan tertentu (Cohen, Bisogno, & Malkogianni, 2019). Kebijakan diskresi akruwal merupakan suatu kebijakan yang timbul dari sebuah transaksi yang dilakukan atau perlakuan akuntansi untuk mengelola pendapatan (Martini, dkk., 2020). Kebijakan diskresi akruwal lahir dari penerapan akuntansi berbasis akruwal. Akuntansi basis akruwal telah banyak diterapkan di berbagai negara di dunia, seperti, Amerika Serikat, Italia, Yunani, Inggris, Spanyol, Swedia, Finlandia, China, dan Malaysia. Akuntansi basis akruwal digunakan di Indonesia sesuai dengan Peraturan No. 71 Tahun 2010, dan Permendagri No. 64 Tahun 2013. Akuntansi berbasis akruwal menyediakan ringkasan yang lebih baik mengenai aktivitas keuangan dan posisi keuangan pemerintah daerah (Šević, Ž., 2004). Berdasarkan penerapan akuntansi basis akruwal, kebijakan diskresi akruwal juga mulai diterapkan oleh pemerintah daerah. Biasanya kebijakan diskresi akruwal digunakan pada sektor privat untuk memanipulasi laba perusahaan, akan tetapi hal tersebut juga dapat terjadi di sektor pemerintahan. Penerapan basis akruwal pada sektor pemerintahan mengakibatkannya terjadi praktik manipulasi akruwal untuk mengoreksi surplus/defisit anggaran untuk mencapai titik impas target keuangannya (Pilcher, et al., 2016). Para politisi memiliki motif untuk melakukan manipulasi akruwal karena tuntutan politik dan kepentingan pribadi mereka sendiri (García-Sánchez, et al., 2014).

Fiscal Distress

Fiscal distress merupakan ketidakberhasilan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan (Shafira & Abdullah, 2023). Pada sektor privat, fiscal distress juga digambarkan sebagai kekurangan yang signifikan (dalam keuangan perusahaan) yang berakibat pada kegagalan membayar dividen pada saham preferen dan obligasi korporasi dan berujung pada kebangkrutan atau pailit (Beaver, 1966; Pradana, 2023). Kesulitan fiskal (*fiscal distress*) sebagai bentuk kegagalan dalam pemenuhan kewajiban, seperti, utang, pelayanan publik, dan kebutuhan akan sumber daya selama bertahun-tahun (Kloha, et al., 2005). Sejatinya, *fiscal distress* merupakan sebuah kejadian unpredictable akibat kondisi pemerintah yang tidak stabil. *Fiscal distress* merupakan akibat dari kegagalan pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya, termasuk pembayaran utang, proses pembangunan, dan kegiatan pelayanan publik lainnya. *Fiscal distress* dapat menyebabkan berkurangnya investor modal pada pemerintah daerah terkait yang akan berakibat pada macetnya kredit pemerintah untuk membayar pengeluaran lain dan pengeluaran untuk pembangunan (Pradana, 2023).

Fiscal Capacity

Fiscal capacity suatu daerah merupakan potensi suatu pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerahnya dalam rangka pemenuhan pelayanan publik yang baik dan sesuai standar yang berlaku (Martinez-Vazquez & Boex, 1997). Kapasitas fiskal

merupakan sebuah konsep sentral dalam analisis pembentukan negara. Kapasitas fiskal suatu daerah secara luas dapat didefinisikan sebagai kemampuan daerah untuk menerapkan serangkaian kebijakan (Besley & Persson, 2010), atau kemampuan suatu negara untuk memungut pajak, menegakkan hukum dan ketertiban, serta menyediakan barang-barang milik umum (Johnson & Koyama, 2017). Kapasitas fiskal menghitung seberapa besar potensi pajak yang dapat diperoleh pemerintah struktur sistem perpajakan dan kekuatan penegakan hukum yang tersedia (Besley & Persson, 2013). Kapasitas fiskal suatu daerah menggambarkan kemampuan suatu pemerintah daerah dalam meningkatkan kondisi keuangannya (Nazikha & Rahmawati, 2021).

Untuk menghitung kapasitas fiskal suatu pemerintah daerah, dapat menggunakan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD), yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Variabel kapasitas fiskal daerah diperoleh dari perhitungan rumus indeks kapasitas fiskal daerah dengan rumus sebagai berikut :

$$KFD_{kabupaten/kota} = pendapatan - [pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan + \text{belanja tertentu}]$$

Keterangan :

$KFD_{kabupaten/kota}$ = Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota ; Pendapatan = Pendapatan daerah yang meliputi; pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, lain-lain pendapatan yang sah ; Pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan = Pendapatan bagi hasil pajak rokok, DBH cukai hasil tembakau, DBH SDA Dana Rekonsiliasi, DAK Fisik, DAK Non-fisik, Dana Otonomi Khusus, Dana Desa ; Belanja tertentu = Belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah untuk daerah otonom baru, belanja bagi hasil, alokasi dana desa.

Government Size

Government size merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa besar atau kecilnya pemerintah daerah tersebut diukur dengan total aset yang dimiliki (Tampubolon, dkk., 2023; Pradana, dkk., 2022). Pemerintah daerah yang berukuran lebih besar cenderung akan lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan, dan laporan keuangannya. Pemerintah daerah yang memiliki ukuran aset yang lebih besar cenderung akan menarik perhatian yang lebih besar, dan akan memiliki risiko penyelewengan yang merugikan pemerintah lebih besar pula (Susilawati, 2016). Semakin besar ukuran pemerintah daerah maka akan semakin mudah dalam melaksanakan kegiatan operasional yang akan memberikan pelayanan yang memadai kepada masyarakat (Kusumawardhani, 2012). Semakin besar ukuran pemerintah daerah maka akan semakin besar kesempatan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber daya alamnya, apabila sumber daya alam dan asetnya dikelola dengan baik, maka akan membantu meningkatkan sumber pendapatan asli daerahnya. Untuk mengukur government size suatu daerah, dapat digunakan dengan berbagai cara yaitu dengan mengukur total aset, jumlah pegawai, total pendapatan, dan tingkat produktivitas (Darmanto, 2012; Abdullah, dkk., 2019). Tinggi atau rendahnya diskresi akrual tergantung pada ukuran pemerintah daerah, semakin besar ukuran pemerintah artinya manipulasi akrual semakin rendah.

$$\text{Government Size} = Ln\Delta\text{Aset}$$

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan No. 28 tahun 2021, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) merupakan selisih penerimaan dan pengeluaran selama satu periode anggaran. SiLPA merupakan sisa anggaran yang diperoleh dari selisih antara rencana pendapatan dan pengeluaran pada akhir periode anggaran yang tersaji dalam LKPD (Mahmudi, 2009). SiLPA terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu SiLPA kinerja keuangan baik dan buruk. Apabila kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut tergolong baik, maka realisasi pendapatan akan melebihi target sehingga penerimaan akan lebih besar dari beban belanja. Akan tetapi, apabila penerimaan pada suatu periode anggaran cenderung lebih banyak dari residu belanja yang tidak terealisasi pada periode anggaran sebelumnya maka kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut terindikasi tidak baik (Rohman, dkk., 2021). Maka dari itu jika pemerintah mengalami peningkatan SiLPA yang terbentuk dari belanja yang tidak terealisasi akibat kurang perencanaan yang dilakukan pemerintah menimbulkan kinerja keuangan yang buruk karena adanya sisa anggaran yang seharusnya menunjukkan nilai nol dalam pengelolaan anggaran untuk menutup defisit anggaran yang terjadi pada periode tersebut (Prasetyo & Rusdi, 2021).

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini penelitian asosiatif kausal, dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan pada 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan data pada periode 2018-2022, yang dianalisis dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah selesai di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh pemerintah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2018-2022 sebanyak 17 kabupaten/kota. Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan adalah teknik sampling jenuh. Penggunaan teknik sample jenuh ini dilakukan karena populasi penelitian kurang dari 30. Sampel pada penelitian ini yaitu 13 kabupaten dan 4 kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, dengan periode 2018-2022. Sampel pada penelitian ini berjumlah 85 sampel.

Sumber data pada penelitian ini yaitu Laporan Keuangan 13 kabupaten dan 4 kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018-2022, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Neraca yang diperoleh dari website PPID Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Berdasarkan sumber datanya, maka dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini merupakan data sekunder. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder pada penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik dokumentasi, dimana penulis mengumpulkan dan mencari data LKPD yang telah di audit oleh BPK pada tahun 2018-2022 yang diakses melalui website resmi PPID Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan statistik deskriptif untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis penelitian. Cara mendeskripsikan data yang dimaksud dapat berupa penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, histogram, persentil, dan hitungan rata-rata lainnya dengan menggunakan alat bantu SmartPLS-SEM (*Partial Least Square – Structural Equation Modelling*). Pada penelitian ini analisis deskriptif dilakukan dengan bantuan aplikasi statistik SmartPLS-SEM Partial Least

Square – Structural Equation Modelling) versi 4.1.0.2. Pemilihan model pada bantuan aplikasi statistik menggunakan *outer model* dan *inner model*.

Outer Model

- a. *Convergent validity* adalah nilai loading faktor pada variabel laten dengan indikator-indikatornya. Nilai yang diharapkan $> 0,7$. Namun demikian, pada riset tahap pengembangan skala, loading 0,50 sampai 0,60 masih dapat diterima ((Ghozali & Latan, 2015:74).
- b. *Discriminant validity* adalah nilai cross loading faktor yang berguna apakah konstruk memiliki diskriminan yang memadai. Nilai ini untuk setiap variabel harus lebih besar dari 0.70 (Hamid & Anwar, 2019:42). Suatu konstruk dikatakan valid apabila nilai perbandingan akar dari AVE lebih besar dengan nilai korelasi antar variabel laten.
- c. *Composite reliability* adalah pengukuran apabila nilai reliabilitas $> 0,7$ maka nilai konstruk tersebut mempunyai nilai reliabilitas yang tinggi.
- d. *Average Variance Extracted (AVE)* adalah rata-rata varian yang setidaknya sebesar 0,5.
- e. *Cronbach alpha* adalah perhitungan untuk membuktikan hasil composite reliability dimana besaran minimalnya adalah 0,6.

Inner Model

- a. “*R Square*. Nilai R-Square 0,75; 0,50; dan 0,25 masing-masing mengindikasikan bahwa model kuat, moderat, dan lemah” (Hamid & Anwar, 2019:43).
- b. “*Effect size (F square)* untuk mengetahui kebaikan model. Interpretasi nilai f square yaitu 0,02 memiliki pengaruh kecil; 0,15 memiliki pengaruh moderat dan 0,35 memiliki pengaruh besar pada level structural” (Hamid & Anwar, 2019:43).
- c. *Prediction relevance (Q square)* atau dikenal dengan *Stone-Geisser*. Uji ini dilakukan untuk mengetahui kapabilitas prediksi seberapa baik nilai yang dihasilkan. Apabila nilai yang didapatkan 0.02 (kecil), 0.15 (sedang) dan 0.35 (besar).

Uji Hipotesis

“Uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan metode bootstrapping. Uji hipotesis dapat dilihat dari nilai t-statistik dan nilai probabilitas. Untuk menguji hipotesis menggunakan nilai statistik maka untuk alpha 5% nilai t-statistik yang digunakan adalah 1,96. Sehingga kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis adalah H_a diterima dan H_0 ditolak ketika t-statistik $> 1,96$. Serta menolak atau menerima hipotesis menggunakan probabilitas maka H_a diterima jika nilai $p < 0,05$ ” (Hussein, 2015:19).

4. Hasil Dan Pembahasan Statistik Deskriptif

Tabel 1. Statistika Deskriptif

Statistik Deskriptif					
	N	Min	Maks	Nilai tengah	Deviasi standar
Manipulasi Akrual	85	22.24	27.88	25.90165	11.7575
<i>Fiscal Distress</i>	85	21.74	27.72	25.70000	0.37206
<i>Fiscal Capacity</i>	85	25.88	29.42	27.52565	0.76171
<i>Government Size</i>	85	28.24	30.55	28.92494	0.52835
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	85	21.00	27.95	24.55500	1.46929

Sumber: Data diolah (2022)

4.1 Hasil Penelitian

a. Uji Validitas

Uji Validitas Konvergen

	X1 Fiscal Distress	X2 Fiscal Capacity	X3 Government Size	X4 SiLPA	Y Manipulasi Akrual
Indeks Kapasitas Fiscal		1.000			
Realisasi SiLPA				1.000	
Surplus/Defisit-LO	1.000				
Total Akrual					1.000
Total Aset			1.000		

Gambar 4.1 Hasil Uji Validitas Konvergen

Berdasarkan hasil pengolahan data yang disajikan pada tabel nilai outer model atau korelasi antara konstruk dengan variabel sudah memenuhi standar convergent validity atau sudah memenuhi syarat indikator yang memiliki nilai loading factor diatas 0,70. Dapat disimpulkan, semua indikator pada variabel penelitian dinyatakan valid.

Variance Inflation Factors (VIF)

Nilai VIF outer model dengan skor < 5 , dapat dinyatakan konstruk telah valid atau layak dipertimbangkan ke analisis berikutnya. Berikut pada gambar 4.2 disajikan hasil pengukuran VIF pada penelitian.

Collinearity statistics (VIF) - Outer model - List	
	VIF
Indeks Kapasitas Fiscal	1.000
Realisasi SiLPA	1.000
Surplus/Defisit-LO	1.000
Total Akrual	1.000
Total Aset	1.000

Gambar 4.2 Hasil Uji VIF

Pada gambar 4.2 dapat dilihat bahwa nilai VIF sebesar $1.000 > 0.5$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Uji *multicollinearity* dilakukan untuk mengetahui

hubungan antar indikator. Untuk mengetahui apakah indikator formatif mengalami multicollinearity dengan mengetahui nilai VIF.

b. Uji Reliabilitas

Outer Weight

Untuk indikator untuk indikator formatif yaitu significance of weights. Nilai weight indikator formatif dengan konstruksya harus signifikan. Jika nilai rata-rata outer weight > 0,70 maka dapat dinyatakan indikator atau dimensi tersebut memiliki reliabilitas yang baik. Berikut pada tabel 4.3 disajikan hasil uji outer weight pada penelitian.

	X1 Fiscal Distress	X2 Fiscal Capacity	X3 Government Size	X4 SILPA	Y Manipulasi Akreal
Indeks Kapasitas Fiscal		1.000			
Realisasi SILPA				1.000	
Surplus/Defisit-LO	1.000				
Total Akreal					1.000
Total Aset			1.000		

Gambar 4.3 Hasil Outer Weight

Berdasarkan hasil uji pada gambar 4.3 hasil outer weight yang diperoleh oleh semua variabel sebesar 1,000 yang artinya > 0,7. Maka dapat disimpulkan bahwa indikator atau dimensi formatif pada penelitian ini memiliki kualitas yang baik.

Inner Model

Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk menilai keterikatan variabel independen berpengaruh secara substantif terhadap variabel independen. Nilai R² memiliki interpretasi apabila 0,75 mengindikasikan bahwa model yang dibuat berpengaruh secara kuat; 0,50 mengindikasikan bahwa berpengaruh secara moderat dan 0,15 mengindikasikan model yang dibuat berpengaruh secara lemah. Berikut pada determinasi (R²) pada penelitian ini :

	R-square	R-square adjusted
Y Manipulasi Akreal	0.683	0.224

Gambar 4.4 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Hasil uji koefisien determinasi sebesar 0,68 variabel *fiscal distress*, *fiscal capacity*, *government size*, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh secara moderat terhadap manipulasi akreal sebesar 68,30%, sedangkan sisanya sebesar 22, variabel lain diluar yang diteliti.

Uji Effect Size (F-square)

	Y Manipulasi Akruai
X1 Fiscal Distress	0.153
X2 Fiscal Capacity	0.000
X3 Government Size	0.459
X4 SiLPA	0.366
Y Manipulasi Akruai	

Gambar 4.5 Uji Effect Size

Berdasarkan hasil uji F^2 pada gambar 4.5 variabel *fiscal distress* mempengaruhi variabel endogen dalam skala moderat atau sedang. Sedangkan variabel *fiscal capacity* tidak mempengaruhi variabel endogen baik dalam skala kecil, moderat, ataupun besar. Variabel *government size* dan SiLPA berpengaruh dalam skala besar terhadap variabel endogen.

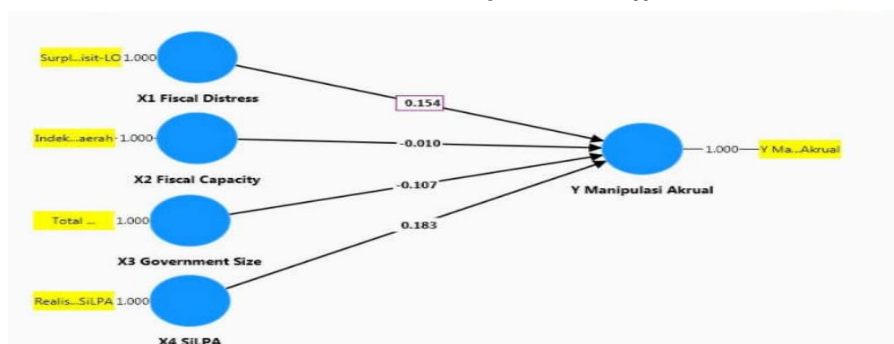
Path Coefficient (Uji Hipotesis)

Pengujian hipotesis pada Smart-PLS dilakukan dengan menggunakan metode *bootstrapping*. Sebuah hipotesis akan diterima apabila memiliki nilai t statistik > 1,96 dan p value < 0,05 untuk kriteria penerimaan H_a diterima dan H_o ditolak. Hasil pengujian hubungan antar variabel penelitian dapat dilihat pada gambar 4.6.1 – 4.6.4 berikut.

	Path coefficients
X1 Fiscal Distress -> Y Manipulasi Akruai	0.154
X2 Fiscal Capacity -> Y Manipulasi Akruai	-0.010
X3 Government Size -> Y Manipulasi Akruai	-0.107
X4 SiLPA -> Y Manipulasi Akruai	0.183

Sumber : Smart-PLS, 2024

Gambar 4.6.1 Hasil Uji Path Coefficient



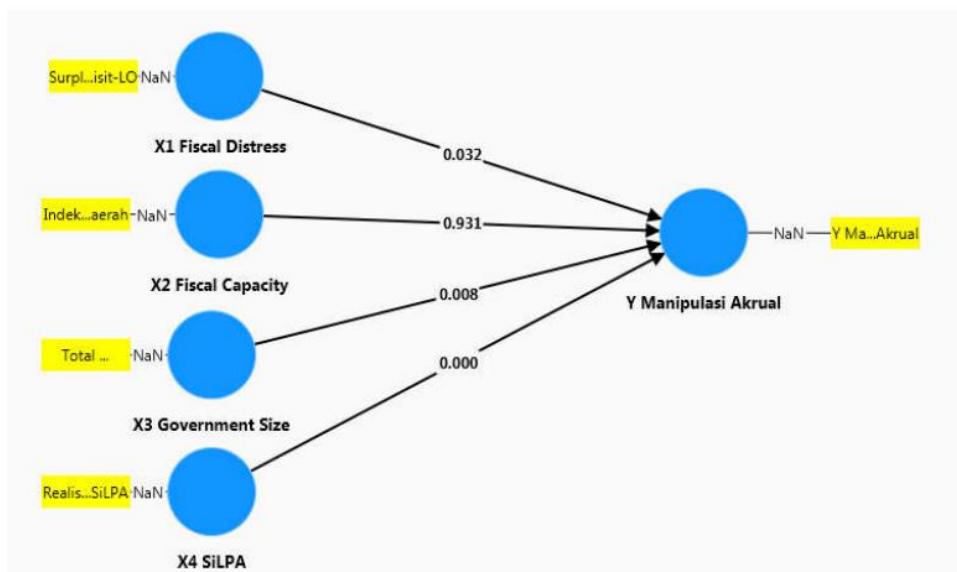
Sumber : Smart-PLS, 2024

Gambar 4.6.2 Graphical Output Path Coefficient

Path coefficients - Mean, STDEV, T values, p values						
	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values	
X1 Fiscal Distress -> Y Manipulasi Akrua	0.154	0.151	0.072	2.147	0.032	
X2 Fiscal Capacity -> Y Manipulasi Akrua	-0.010	-0.013	0.120	0.087	0.931	
X3 Government Size -> Y Manipulasi Akrua	-0.107	-0.104	0.041	2.633	0.008	
X4 SILPA -> Y Manipulasi Akrua	0.183	0.185	0.047	3.870	0.000	

Sumber : Smart-PLS, 2024

Gambar 4.6.3 Uji Path Coefficient – MEAN, STDEV, T values, p values



Sumber : Smart-PLS, 2024

Gambar 4.6.4 Graphical Output Uji Path Coefficient

Berdasarkan hasil uji hipotesis melalui metode bootstrapping pada gambar 4.6 dapat diuraikan penjelasan setiap variabelnya sebagai berikut :

1. H1 = *Fiscal Distress* berpengaruh signifikan terhadap Manipulasi Akrua Dari tabel 4.15 diatas, variabel fiscal distress memiliki nilai t-statistik sebesar 2,147 > 1,96, nilai p-values sebesar 0,032 < 0,050. Hasil ini menunjukkan bahwa fiscal distress berpengaruh positif dan signifikan terhadap manipulasi akrua, semakin besar nilai fisca Dapat disimpulkan bahwa H1 diterima karena telah memenuhi standar uji hipotesis Smart-PLS bootstrapping.
2. H2 = *Fiscal Capacity* berpengaruh signifikan terhadap Manipulasi Akrua Berdasarkan hasil uji path coefficient pada SMART-PLS, didapatkan hasil t-statistik untuk variabel fiscal capacity sebesar 0,087 < 1,96 dan nilai pvalues sebesar 0,931 > 0,050.
3. H3 = *Government Size* berpengaruh terhadap Manipulasi Akrua Berdasarkan hasil uji path coefficient pada tabel 4.15, dapat dilihat bahwa variabel government size memiliki nilai t-statistik sebesar 2,633 > 1,96 dan nilai p-values 0,008 < 0,050. Nilai original sample variabel government size sebesar negatif 0,107 yang artinya variabel government size memiliki pengaruh negatif terhadap manipulasi akrua, dimana semakin besar ukuran suatu pemerintah daerah maka akan semakin kecil tingkat manipulasi akrualnya.

4. H4 = Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh terhadap Manipulasi Akrual Hasil uji hipotesis yang disajikan pada tabel 4.15 menunjukkan t-statistik variabel sisa lebih perhitungan anggaran sebesar $3,870 > 1,96$ dan nilai p-values sebesar $0,000 < 0,050$.

4.2 Pembahasan Penelitian

Berdasarkan hasil uji parsial yang telah dilakukan pada tabel 4.15 didapat hasil t-statistik sebesar 2,147 yang mana t-statistiknya lebih besar dari 1,96 dan nilai p-values sebesar 0,032 lebih kecil dari 0,05. Nilai original sample pada uji path coefficient untuk variabel fiscal distress sebesar positif 0,154 yang berarti antara variabel fiscal distress dan manipulasi akrual memiliki hubungan positif. Hasil uji f-square menunjukkan bahwa variabel fiscal distress berpengaruh secara moderat terhadap manipulasi akrual. Dari hasil uji tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa H1 diterima, dan fiscal distress memiliki hubungan positif dan signifikansi terhadap manipulasi akrual. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Handayani, dkk., (2022) dan Abdullah & Kamal (2023) yang menyatakan bahwa fiscal distress berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap manipulasi akrual. Hasil uji penelitian ini menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat kesulitan fiskal (fiscal distress) yang dialami suatu pemerintah daerah maka akan semakin tinggi pula tingkat manipulasi akrual yang dilakukan pada pemerintah daerah tersebut. Kesulitan fiskal yang dialami setiap pemerintah daerah di Indonesia akan mengakibatkan tidak maksimalnya pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat, sehingga pemerintah daerah tersebut akan mengalami kegagalan dalam pemenuhan standar operasional, pembayaran hutang, pelayanan masyarakat, pembangunan daerah, dan akan mengakibatkan keberlanjutan keuangan yang buruk.

Hasil uji parsial yang ditampilkan pada tabel 4.15 menunjukkan nilai tstatistik untuk variabel fiscal capacity sebesar $0,087 < 1,96$ dan nilai p-values sebesar $0,931 > 0,050$. Berdasarkan hasil uji tersebut, nilai t-statistik dan p-values untuk variabel kapasitas fiskal tidak memenuhi syarat uji signifikansi, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak dan variabel fiscal capacity tidak memiliki pengaruh terhadap manipulasi akrual. Nilai negatif yang didapat saat uji path coefficient menunjukkan bahwa arah hubungan berlawanan antara variabel fiscal capacity dan variabel manipulasi akrual. Semakin tinggi nilai fiscal capacity suatu pemerintah daerah, maka akan semakin rendah tingkat manipulasi akrual yang dilakukan daerah tersebut. Akan tetapi, hubungan ini dapat diabaikan karena secara statistik variabel fiscal capacity tidak berpengaruh terhadap manipulasi akrual sehingga hubungan tersebut tidak bermakna. Kapasitas fiskal suatu pemerintah daerah merupakan indikator dalam mengukur kemampuan suatu daerah dalam memenuhi kebutuhan operasional, dan kewajiban-kewajibannya (Nagowi, 2007). Kapasitas fiskal suatu pemerintah daerah kerap kali dijadikan pertimbangan oportunistik bagi suatu pemerintah daerah karena penetapannya menggunakan pendekatan politik (Handayani, dkk., 2022; Donatella, 2019; Abdullah, 2012; Halim & Abdullah, 2006). Akibatnya, dalam anggaran tersimpan budget slack dan dalam pelaporan keuangan akan terjadi variance (selisih anggaran dan realisasinya). Kapasitas fiskal daerah tidak lepas dari peran pemerintah pusat melalui dana transfer sebagai bentuk upaya untuk pemerataan pelayanan kepada masyarakat. Pemerataan kapasitas fiskal sebagai upaya meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk memberikan standar pelayanan yang sama tanpa memaksakan beban

kepada publik (Petchey, 2011). Namun, dalam penelitian ini tidak ditemukan adanya pengaruh fiscal capacity terhadap manipulasi akrual.

Hasil uji path coefficient pada tabel 4.15 menunjukkan nilai t-statistik sebesar $2,633 > 1,96$ dan nilai p-values sebesar $0,008 < 0,050$ untuk variabel government size atau ukuran pemerintah. Hubungan antara variabel government size dan manipulasi saat uji f-square memiliki pengaruh yang kuat. Nilai original sample yaitu negatif 0,107 yang artinya arah hubungan antara variabel eksogen dan variabel endogen memiliki hubungan negatif. Sehingga, dapat disimpulkan berdasarkan persyaratan uji signifikansi maka H3 diterima, yang artinya variabel government size memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap manipulasi akrual, yang artinya semakin besar ukuran pemerintah daerah maka akan semakin kecil tingkat manipulasi akrual yang dilakukan suatu pemerintah daerah. Variabel government size dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang kuat terhadap praktik manipulasi akrual, meskipun arah hubungan antar variabel eksogen dan endogen tersebut memiliki arah negatif. Pemerintah daerah yang lebih besar memiliki beban tugas yang kompleks sehingga semakin meningkatnya pelayanan dan aset yang yang dikelola akan besar dan begitu juga dengan pengelolaan keuangan dan anggaran daerah. Sehingga baik pemerintah pusat maupun masyarakat akan memberikan spotlight yang lebih terhadap pemerintah daerah yang memiliki ukuran yang lebih besar, government size yang lebih besar dapat menyebabkan kompleksitas dan tantangan dalam pengawasan.

Berdasarkan hasil uji path coefficient yang disajikan pada tabel 4.15 menunjukkan nilai t-statistik sebesar $3,870 > 1,96$ dan nilai p-values sebesar $0,000 < 0,05$. Nilai original sample untuk variabel sisa lebih perhitungan anggaran sebesar positif 0,183. Hasil uji f-square menggambarkan bahwa pengaruh variabel sisa lebih perhitungan anggaran terhadap manipulasi akrual sangat kuat. Berdasarkan hasil uji signifikansi tersebut dapat disimpulkan bahwa H4 diterima, yang artinya variabel sisa lebih perhitungan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap praktik manipulasi akrual di pemerintah kabupaten/kota. Semakin besar nilai SiLPA yang dimiliki suatu pemerintah daerah, maka akan semakin tinggi penetapan diskresi akrual pada laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini berbeda dari penelitian yang dilakukan Tampubolon, dkk., (2023) yang menyatakan bahwa variabel SiLPA berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap praktik manipulasi akrual, yang artinya jika SiLPA meningkat maka manipulasi akan turun, begitu juga sebaliknya.

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi yang dilakukan, variabel fiscal distress, fiscal capacity, government size, dan sisa lebih perhitungan anggaran memiliki nilai kekuatan moderat sebesar 0,68 atau 68% terhadap manipulasi akrual, dengan demikian H5 diterima dan variabel fiscal distress, fiscal capacity, government size, dan sisa lebih perhitungan anggaran berpengaruh secara simultan terhadap praktik manipulasi akrual. Artinya semua variabel independent secara simultan merupakan faktor-faktor yang saling mempengaruhi adanya praktik manipulasi akrual. Hal ini menunjukkan bahwa ke empat variabel eksogen tersebut menjelaskan pengaruh terhadap variabel endogen sebesar 68%, sedangkan sebesar 22% lagi dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini seperti adanya insentif yang diberikan pemerintah kepada pengelola keuangan pemerintah daerah (Gamayuni, 2022), kemudian adanya tekanan dari pemangku kepentingan eksternal dan penyusutan dan beban penurunan nilai aset tetap juga mendorong praktik manipulasi akrual (Arcas & Martí,

2016). Hasil temuan dari Pina, et al., (2012), bahwa penggunaan praktik manipulasi akrual telah banyak di dokumentasikan di sektor swasta dan juga ditemukan di instansi pemerintah yang menggunakan praktik manipulasi akrual untuk mengurangi biaya operasi bersih yang akan dilaporkan.

5. Kesimpulan

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu variabel *Fiscal Distress* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Manipulasi Akrual di Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. *Fiscal Capacity* tidak berpengaruh terhadap Manipulasi Akrual di Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. *Government Size* berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap Manipulasi Akrual di Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. *Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Manipulasi Akrual di Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. *Fiscal Distress*, *Fiscal Capacity*, *Government Size*, dan *Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)* secara bersama-sama mampu mempengaruhi Manipulasi Akrual di Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

5.2 Keterbatasan penelitian

Keterbatasan penelitian terletak pada variabel dan sampel yang digunakan. Peneliti selanjutnya sebaiknya menambahkan beberapa variabel baru seperti dana insentif daerah, kualitas audit, keadaan politik seperti status politik petahana, penggunaan *specific accruals*, dan internal audit agar memberikan gambaran lebih menyeluruh dan akurat terkait praktik manipulasi akrual. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengambil jumlah sampel yang lebih luas lagi, seperti provinsi di seluruh Indonesia, atau seluruh kota di Provinsi Pulau Sumatera.

5.3Saran

Saran bagi pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan agar dapat membuat perencanaan yang baik agar tidak perlu melakukan praktik manipulasi akrual pada saat penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Peneliti selanjutnya disarankan menggunakan data dengan rentang waktu periode yang terbaru serta diharapkan menambah objek penelitian atau memperluas wilayah penelitian agar hasil yang diperoleh lebih tergeneralisasi. Peneliti selanjutnya disarankan menggunakan indikator pengukuran yang berbeda pada variabel *fiscal distress*, sebagai pembanding agar menambah literatur penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdullah, S., Saputra, M., Fazella, D., Hasnawati, H., & Afridzal, A. (2019). Determinan kinerja anggaran belanja pendidikan pada kabupaten/kota di Aceh. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 19(2), 149-166.

- [2] Afiqoh, N. W. (2020). Application Of Accrual-Based Government Accounting Standards and Obtaining Fair Opinions Without Exceptions. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 3(2), 244-259.
- [3] Arista, S. P., & Serly, V. (2023). Pengaruh Financial distress, Karakteristik Komite Audit dan Kualitas Auditor Eksternal terhadap Manajemen Laba Akrual. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 5(3), 917-935.
- [4] Armaini, Y. D. N. R. (2019). Determinan Fiscal Stress Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 3(1), 68-78.
- [5] Beck, A. W. (2018). Opportunistic financial reporting around municipal bond issues. *Review of Accounting Studies*, 23(3), 785-826.
- [6] Bisogno, M., & Donatella, P. (2022). Earnings management in public-sector organizations: a structured literature review. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 34(6), 1-25.
- [7] Cohen, S., Costanzo, A., & Manes-rossi, F. (2017). Auditors and Early Signals of financial Distress in Local Governments. *Managerial Auditing Journal*, 32(3), 234–250. DOI: <https://doi.org/10.1108/MAJ-05-2016-1371>.
- [8] Cohen, S., Bisogno, M., & Malkogianni, I. (2019). Earnings management in local governments: the role of political factors. *Journal of Applied Accounting Research*, 20(3), 331-348.
- [9] Damayanti, Carolina Reni, and Warsito Kawedar. (2019). "Pengaruh profitabilitas, mekanisme pemantauan dan financial distress terhadap manajemen laba." *Diponegoro journal of accounting* 7, no. 4.
- [10] Ellwood, S., & Newberry, S. (2007). Public sector accrual accounting: institutionalising neo-liberal principles?. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 20(4), 549-573.
- [11] Ferreira, A., Carvalho, J., & Pinho, F. (2020). Political competition as a motivation for earnings management close to zero: the case of Portuguese municipalities. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 32(3), 461-485.
- [12] Gamayuni, R. R. (2022). Motivation And Abnormal Accrual Characteristics On Financial Statements of Local Governments In Indonesia. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 19(2), 969-991.
- [13] Handayani., Darwanis., & Abdullah, S. (2022). Determinan Manipulasi Akrual Dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 12(2),275-291.
- [14] Indrayani, K. D., & Widiastuti, H. (2020). Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan

- pemerintah daerah dengan kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel moderasi (studi empiris pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Klaten). *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 1-16.
- [15] Khanifah, K., Yuyetta, E. N. A., & Sa'diyah, E. (2020). Analisis Komparatif Tingkat Manajemen Laba Berbasis AkruaI dan Riil pada Perusahaan Industri Dasar dan Kimia yang Tergabung dalam Indeks Saham Syari'ah Indonesia (ISSI). *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 27(1).
- [16] Martini, R., Agustin, R., & Sari, K. R. (2020). Accrual Discretion Policy on Excess/Less Budget Financing at the Provincial Level. *TEST Engineering & Management*, 82(9925), 9925-9935.
- [17] Martinez-Vazquez, J., & Jameson Boex, L. F. (1997). Fiscal Capacity: An overview of concepts and measurement issues and their applicability in the Russian Federation. GSU Andrew Young School of Policy Studies Working Paper, (97-3).
- [18] Octariyani, E., Gamayuni, R. R., & Dharma, F. (2022). Implementation of Discretionary Accrual in Local Governments and Motivation of Local Government Incentives: Literature Review. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 22(22), 272-279.
- [19] Olivian, G. R., & Wahidahwati, W. (2021). Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan dan Kualitas Auditor terhadap Manipulasi Aktivitas Riil. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(7).
- [20] Putri, M., Abdullah, S., Adnan, A., & Yusmita, F. (2023). Manipulasi AkruaI Dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia: Apakah Government Size dan Kapasitas Fiskal Memiliki Efek?. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 8(4), 536-544.
- [21] Peraturan Menteri Keuangan No. 126/PMK.07/2019 tentang Kapasitas Fiskal Daerah (KFD).
- [22] Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- [23] Permendagri No. 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan.